

IRONI DI BALIK PEMBANGUNAN KAPITALISME: MENELISIK KRITIK PETER L. BERGER TERHADAP IDEOLOGI KAPITALISME

Apolonaris Ola Suan

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere NTT, Indonesia

*Email: arissuan3@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis atau menelaah realitas ironis di balik pembangunan menurut ideologi kapitalisme dalam gagasan Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, pembangunan manusia berbasis ideologi kapitalis, menyiratkan dan mensyaratkan dua dimensi memilukan, yang di satu sisi, menyelubungi mitos pertumbuhan ekonomi bagi keuntungan pemilik modal, dan di sisi lain hal ini mensyaratkan 'kurban manusia' sebagai penopangnya yang membentuk piramida. Dengan demikian, Berger berpendapat bahwa pembangunan seharusnya hadir untuk meniadakan derita, bukan sebagai sebaliknya sebagai sumber penderitaan rakyat sendiri akibat mitos pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan serta ideologi subjektif yang terselip dalam kebijakan tujuan pembangunan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dewasa ini menunjukkan hal serupa yang mensyaratkan manusia sebagai ongkos pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut penulis menyarankan gagasan etika humanistik Peter L. Berger sebagai sebuah konsep yang cukup tangguh dan relevan dalam menyingkapi dan memberantas masalah pembangunan tersebut.

Kata kunci: manusia, etika humanistik, kapitalisme, mitos pertumbuhan, kemiskinan

Abstract

This paper is the author's attempt to show the ironic reality behind development according to the ideology of capitalism of Peter L. Berger's ideas. According to Peter L. Berger, human development based on capitalist ideology, implies and

requires two heartbreaking dimensions, which on the one hand, cloak the myth of economic growth for the benefit of capital owners, and on the other hand this requires 'human sacrifice' as its support that forms the pyramid. Thus, Berger argues that development should be present to eliminate suffering, not as a source of suffering for the people themselves due to the myth of promised economic growth and the subjective ideology that is hidden in the policy of the development goal itself. The method used in this paper is a literature research method. The conclusion of this study shows that today's development shows similar things that require humans as the cost of development. Therefore, based on this research, the author suggests the idea of Peter L. Berger's public relations ethics as a concept that is quite resilient and relevant in addressing and eradicating the development problem.

Keywords: *Human, Humanistic ethics, Capitalism growth myth, and Poverty*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan menjadi hal urgen yang membutuhkan perhatian khusus dari negara. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai ketidakmampuan kelompok masyarakat dalam suatu wilayah untuk mengelola hasil alam wilayah tersebut, dan akibat keterbelakangan dalam berbagai dimensi kehidupan karena kurangnya sarana-prasarana yang memadai untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat (Amartya Sen, 2000). Di wilayah-wilayah hilir, hal ini nampak sangat jelas, kurangnya pendidikan sebagai titik penghasil sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya alat industri untuk mengelola kekayaan alam demi memenuhi kebutuhan pangan serta kurangnya akses informasi untuk memperkenalkan keindahan wilayah tertentu kepada dunia global serta menerima informasi dari dunia luar, dan lain-lain.

Faktor-faktor tersebut merupakan dasar kemiskinan dari suatu wilayah, yang tentu membutuhkan perhatian khusus dari lembaga tertinggi yaitu negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengatasi hal tersebut ialah melalui pembangunan. Dalam pembangunan, faktor-faktor dasar penyebab kemiskinan dapat dipenuhi atau diatasi; negara menyediakan pendidikan yang baik bagi masyarakat sekitar, menyediakan instrument atau alat untuk mengelola kekayaan guna menghasilkan suatu produk yang berdampak baik bagi masyarakat sekitar, serta menyediakan sarana informasi bagi masyarakat sekitar untuk memperkenalkan keindahan serta kekahasaan yang menarik kepada dunia luar. Melalui pembangunan,

kemiskinan dapat diatasi sebab, orientasi dari pembangunan itu sendiri yaitu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Orientasi pembangunan suatu wilayah ialah menciptakan kemajuan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat demi pembangunan tersebut mesti mempertimbangkan situasi atau keadaan masyarakat sekitar, dan melibatkan masyarakat dalam partisipasi pembangunan itu. Melalui cara ini, masyarakat mengetahui apa tujuan pembangunan serta dampak apa yang akan diterima dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini hakikat dari pembangunan ialah kesejahteraan masyarakat, yang memiliki daya transformatif dengan mengadirkan suatu kemajuan serta memenuhi faktor-faktor atau tuntutan-tuntutan dasariah masyarakat sekitar agar terbebas dari kemiskinan yang mereka alami (Peter L. Berger, 2004).

Hakekat pembangunan ialah kesejahteraan masyarakat. Hakekat ini akan pudar atau ternoda jika tujuan pembangunan itu dibuat demi segelintir orang (Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, & Rizki Erdayani, 2022). Atas nama rakyat dan visi kesejahteraan, para pemilik modal menyelimuti suatu ideologi yang di dalamnya terkandung suatu tujuan muslihat yaitu keuntungan mereka. Sebagian realitas menunjukkan hal itu. Pembangunan yang dibuat pada suatu wilayah tertentu atas nama rakyat dan janji utopis pemberantasan kemiskinan jatuh ke tangan para pemilik modal. Kekayaan suatu wilayah dieksploitasi demi keuntungan pemilik modal, terjadi hegemoni kebijakan atau kebijakan publik diambil sepihak, (Alexander Jebadu, 2021) bubarnya masyarakat-masyarakat adat, serta hilangnya pendapatan dari masyarakat lokal akibat pembangunan yang mesti merebut sebagian tanah mereka.

Dengan demikian, pembangunan sebagai langkah pemberantasan kemiskinan, kini hadir sebagai wadah yang membenamkan masyarakat dalam suatu kemiskinan mendalam, dengan suatu janji utopis yang meninabobokan masyarakat dalam kemuslihatan pembangunan tersebut. masyarakat akan disuap dengan remah-remah keuntungan pembangunan, agar terus terbungkam dalam kemiskinan dan penderitaan yang semakin dirasakan, dan para pemilik modal akan terus hidup berakus-rakusan dalam keuntungan dari hasil muslihat. Kebijakan-kebijakan pembangunan atas nama rakyat akan terus dibuat, namun praktik dari kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan. Akibatnya akan selalu ada jurang yang dalam antara kebijakan dan praktik pembangunan dan hasilnya rakyat akan tetap terbungkam untuk hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang tak berakhir sambil menanti hasil dari kebijakan yang tak pernah terealisasi.

Peter L. Berger menegaskan bahwa pembangunan mesti memperhitungkan biaya-biaya manusia yaitu Pertama, “perhitungan penderitaan” (*calculus of pains*). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh Berger merujuk pada berbagai penderitaan fisik yang kerap muncul akibat pembangunan seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan. Kedua “perhitungan makna” (*calculus of meaning*). Perhitungan makna yang dimaksudkan Berger merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki (Bernardus Badj, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menunjukkan pendekatan positif dan negatif terhadap pembangunan. Namun pendekatan negatif yang menempatkan penderitaan sebagai dalil utama pembangunan akan menjadi konsep utama dalam pembahasan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyelesaian tulisan ilmiah ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Menurut Abdul Rrahman Soleh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah (Soleh, 2011). Jadi, dalam metode ini, penulis berusaha mencari dan meramu berbagai buku, literatur, serta artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema yang didalami oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Peter L Berger (M, Sastrapeatedja, 1992: XIV)

Peter lidwig berger merupakan seorang sosiolog yang lahir di Viena pada 17 maret 1929 dan bermigrasi ke Amerika setelah perang dunia II. Ia menghabiskan separuh hidupnya sebagai pengajar di *the new school for social research university* Rutgers dan universitas boston. Tentang riwayat hidupnya begitu diketahui. Namun Peter ini terkenal oleh karena buku-bukunya seperti *the social construction of reality: A treatise in sociology of knowledge*) yang dianggap paling berpengaruh dalam sosiolog pengetahuan dan pengembangan konstrusionalisme sosial. Selain itu, terdapat buku-buku lain yang ditulis oleh l berger yakni: *invitation to sociology A humanictic perspective*, *A rumor of angles: modern society and rediscovery of supernatural*, dan *the sacred canopy: elemen of social theory of religion*.

Pembangunan Bagi Berger

Dalam beberapa karya, Peter L Berger mengembangkan sejumlah gagasan yang berkontribusi bagi pembangunan. Baginya dalam pembangunan, yang paling diperhitungkan adalah nilai-nilai manusia. Pandangan ini berangkat dari pengamatannya terhadap ukuran pembangunan yang terjadi di Brasil berdasarkan ideologi kapitalis yang berhasil menyita berbagai dimensi kehidupan termasuk kehidupan manusia itu sendiri demi kemajuan pembangunan yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sendiri selalu berangkat dari sejarah penderitaan manusia yang tak terelakan dan merupakan jawaban atasnya. Berbagai penderitaan tersebut, dimunculkan ke permukaan sebagai bahan mentah bagi para sejarawan. Penderitaan tersebut kemudian dikelola dan dihasilkan melalui catatan sejarah dalam bentuk sudah terkategori: penderitaan kelaparan, wabah penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Sejarah tersebut lalu dijadikan sebagai sebuah patokan bagi penilaian masa kini dan masa depan, kadangkala pula sejarah kesengsaraan tersebut dilihat sebagai hal positif yang mesti terjadi demi kemajuan atau kesejahteraan dunia masa kini dan masa yang akan datang.

Di pihak lain, sejarah penderitaan masa silam dimodifikasi dan dimanipulasi demi pembenaran bagi satu kejadian yang datang setelahnya sebagai jawaban atas penderitaan tersebut, kendati jawaban tersebut sendiri menguras banyak korban demi jawaban yang diberikan. Hal ini terkadang menjadi sebuah keuntungan bagi segelintir orang yang ingin merumuskan atau merencanakan sesuatu di masa depan. Ia dapat memodifikasi atau memanipulasi makna penderitaan tersebut sebagai hal yang tak terelakan demi masa depan yang cemerlang.

Uraian singkat tersebut berpaut dengan peristiwa kebijaksanaan politik-pembangunan di Brazil puluhan tahun silam yang menggunakan manusia sebagai ongkos dalam dinamika permainan mereka. Hal tersebut dimulain ketika kekuasaan berhasil dipegang oleh kaum militer pada tahun 1964 yang sendiri memproklamasikan revolusi awal dari apa yang disebut sebagai revolusi Brazil. Tujuan perebutan tersebut dalam jangka waktu yang panjang adalah mengubah Brazil dari suatu negara yang miskin dan terbelakang menjadi suatu negara modern dalam rencana pembangunan nasional (Berger, 2004). Model pembangunan yang dikenakan pada waktu itu adalah prinsip kapitalis, yang berlandaskan ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar menjadi salah satu

model yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu berbagai kebijakan politik mesti diarahkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rezim kemiliteran, berbagai kebijaksanaan politik atau kritik politik ditahan dalam satu wadah yang tertutup dan hanya menyediakan satu celah bagi kebijaksanaan politik yang berdiri sebagai tumpuan bagi pembangunan ekonomi kapitalis. Sifat eksklusif yang diciptakan memang bertujuan untung menjaga dan memelihara kestabilan pertumbuhan ekonomi. Berbagai halangan yang berada di hadapan pembangunan yang berlandaskan ideologi kapitalis ini akan dilantahkan dan diinjak. Ideologi yang menggerakkan pertumbuhan ini adalah pergerakan mekanistik yang bebas nilai, di mana nilai-nilai moralitas tidak sama sekali diperhitungkan dalam tujuan pertumbuhan yang hendak dicapai. Berbagai kebijaksanaan yang diambil baik itu yang bebas nilai atau tidak, baik itu kebijaksanaan politik atau sosial mesti selalu terarah pada pertumbuhan ekonomi yang dapat mentransformasi masyarakat sedemikian rupa ke arah modernisasi. Setiap penalaran atau kebijakan dari hampir semua tindakan pemerintah secara terus terang didasarkan kepada alasan ekonomi, yang mana berakhir pada tujuan integrasi nasional (Berger, 2004). Maksud dari integrasi ini adalah bahwa usaha-usaha yang dibuat selalu bertujuan menghilangkan keterpencilan dan keterbelakangan daerah-daerah Brazil.

Wadah tersebut mendorong corak pembangunan yang terus bergerak dalam arah kemajuan. Akan tetapi pembangunan yang ditunjukkan dalam hal ini nampaknya tidak menyentuh atau memberi tekanan pada pembagian hasil keuntungan pembangunan tersebut. Akibatnya, upaya pemberantasan kemiskinan atau sekurang-kurangnya mengurangi penderitaan dari yang tak berkecukupan tertunda, dan hal tersebut diterima sebagai suatu keadaan yang mesti ditimpahkan kepada rakyat akibat pertumbuhan dan kemajuan pembangunan. Penderitaan tersebut merupakan hal yang sifatnya sementara demi masa depan yang cemerlang

Di pihak lain, kebijaksanaan politik yang diambil tidak menunjukkan secara tepat apa yang sedang bertumbuh bersama kebijaksanaan politik itu. Akan tetapi satu hal jelas tampak di situ bahwa kecenderungan industri padat modal sedang bertumbuh. Corak kecenderungan ini sangat berkembang pesat di dalam dinamika pembangunan Brazil yang berideologi kapitalis, di mana barang-barang konsumsi tahan lama diproduksi, yang dibiayai dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan negara asing. Barang-barang yang diproduksi demi pertumbuhan ekonomi di Brazil, merupakan barang mewah yang tak terjangkau oleh rakyat-rakyat kecil Brazil, melainkan tertahan dalam kelompok minoritas yang memiliki privilese dan keistiwahan terstentut untuk

merasakan hasil produksi tersebut. (Berger, 2004) Di lain sisi, model industri padat modal sebagai kerangka pertumbuhan ekonomi yang layaknya menyediakan lapangan pekerjaan dan memperdaya rakyat miskin serta membantu mengurangi angka pengangguran, justru menunjukkan keengganan untuk memperdaya para pengangguran dan rakyat miskin dalam model industri tersebut. Hal ini terjadi sebab industri yang dijalankan kala itu bergerak secara otomatis yang dikendalikan oleh segelintir orang ahli saja.

Terobsesi akan suatu kemakmuran yang akan datang, kebijaksanaan politik yang dibentuk dalam pembangunan sama sekali tidak merumuskan model atau cara yang paling kurang mengurangi penderitaan rakyat. Tekanan lain yang dalam kebijaksanaan politik demi pertumbuhan ekonomi adalah anti inflasi yang menekan upah rakyat. Kebijakan anti-inflasi ini, melahirkan suatu permasalahan baru yang digeluti oleh rakyat dalam penderitaan yang timbul dalam berbagai bentuk. Kebijakan-kebijaksanaan yang dibentuk dalam rezim kemiliteran Brazil kala itu demi pembangunan sendiri secara terang-terangan memberikan imbas yang menyedot habis kehidupan manusia dan menumpahkan lagi dalam penderitaan yang semakin meluas dan mendalam.

Kendati secara terang-terangan penderitaan tercuat ke permukaan dalam dinamisme pembangunan ekonomi-kapitalis, pemerintah Brazil sendiri tidak mengubris hal tersebut, melainkan melihatnya sebagai sebuah fenomena yang niscaya terjadi demi pemerataan dan kesejateraan bagi generasi yang akan datang. Sikap tersebut bagaikan belati yang membunuh rakyat sebelum kematiannya dalam harapan yang terapung ke permukaan harapan mereka. Modal-modal dan keuntungan ditahan secara ketat oleh para pengambil kebijaksanaan politik demi suatu keinginan samar yang tersaji dalam sikap ketidakpastian. Alhasil, kematian akibat kelaparan dan penderitaan yang bertambah dari rakyat miskin memang mesti menjadi ongkos bagi biaya kemakmuran yang mahal di masa depan.

Model pembangunan yang dilancarkan oleh rezim Brazil kala itu mengusik Peter L. Berger untuk menemukan sebuah alternatif pembangunan. Baginya pembangunan ini harus diberantas atau dihilangkan sebab masa depan yang disajikan merupakan sebuah mitos belaka, yang memberi peluang bagi para pemilik modal mengeksploitasi tenaga atau kekayaan alam rakyat demi keuntungan mereka. Logika yang bermain dalam pembangunan semacam ini yaitu logika pasar atau persaingan, di mana yang lemah dalam permainan ini harus disingkirkan (Fulcher, 2021). Hal ini berimbas pada penderitaan dan kemiskinan yang semakin parah pada rakyat.

Alternatif yang diajukan Peter L Bergre dalam pembangunan yang berongkoskan manusia berdasarkan dua kriteria etis yakni pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan kedua penghitungan makna (*calculus of mean*). Perhitungan penderitaan merujuk pada berbagai penderitaan fisik manusia berupa kelaparan, ketidakmerataan, kerugian rakyat dan penindasan akibat pembangunan dan perhitungan makna merujuk pada hilangnya pengetahuan manusia akan kearifan lokal. Atau dengan rumusan lain, pembangunan harus dibuat atas dasar etika humanistik yang memperhitungkan nilai manusia. nilai-nilai kemanusiaan mesti ditempatkan pada posisi pertama (Berger, 1982) sehingga pembangunan ini akan terus berorientasi pada tanggungjawabnya yaitu sebagai peniada derita.

Sekilas Pembangunan

Salah satu tujuan utama pembangunan yaitu mengatasi masalah-masalah fundamental negara seperti kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran umum bagi masyarakat. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan transformasi menuju pada segi kebaruan atau kemajuan. Pengertian singkat ini jelas mengindikasikan bahwa pembangunan dibuat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan suatu wilayah. Dengan demikian, Dasar dan tujuan dari pembangunan semestinya mampu untuk melahirkan atau membentuk manusia baru dari sebuah kehidupan yang lama menuju pada kehidupan yang baik (Kristeva, 2014). Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah niscaya merupakan tujuan dasar pembangunan. Jika manusia merupakan subyek pembangunan, maka pendekatan pembangunan ini tidak berkaitan dengan salah satu bidang kehidupan masyarakat saja seperti bidang ekonomi, melainkan segi-sigi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, dalam pembangunan bidang-bidang atau nilai-nilai kehidupan yang lain mesti diperhatikan pula. Bentuk pertimbangan itu dibuat dengan melibatkan partisipasi kognitif masyarakat. Masyarakat hadir untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan serta menentukan kebijakan bersama agar arah pembangunan terus terarah pada hakikatnya sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang dibuat bersama-sama selalu mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan yang lain, sehingga pembangunan akan terjadi dengan tidak mengorbankan nilai-nilai atau segi-segi kehidupan masyarakat sekitar seperti pengusiran masyarakat adat, pengusuran lahan masyarakat sebagai sumber pendapatan mereka, atau terjadinya krisis ekologi akibat pembangunan. Selain itu melalui partisipasi kognitif ini, masyarakat pula akan merasakan sendiri keuntungan dan kesejahteraan dari hasil

pembangunan, serta bersama-sama masuk untuk menciptakan atau memproduksi apa yang dibutuhkan dari masyarakat sekitar dengan apa yang disediakan dalam tindakan pembangunan ini. Atau dengan kata lain, kebijakan tersebut menjadi akar yang membantu agar proses pembangunan didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang, layak secara ekonomis, dan adil secara etika dan sosial masyarakat (Sedarmayanti, Sastrayuda, & Afriza: 2018)

Persoalan akan terjadi jika dalam membuat kebijakan bersama, terjadi hegemoni kebijakan atau masyarakat tidak dilibatkan untuk menentukan arah pembangunan. Kebijakan yang dibuat secara berat sebelah secara dasariah tidak mampu untuk memberantas kemiskinan atau penderitaan masyarakat, kebijakan itu mungkin akan dapat memenuhi salah satu segi kehidupan masyarakat tetapi tetap meninggalkan jejak penderitaan yang tak terhapus. Dengan demikian, dalam pembangunan partisipasi kognitif masyarakat sangat dibutuhkan. Kebijakan yang dibuat bersama, menciptakan suatu keseimbangan dan dalam keseimbangan ini kebijakan tersebut pula akan selalu menghadirkan orientasi nilai dalam orientasi tujuan pembangunan itu sendiri sehingga hakekat pembangunan itu terus ditonjolkan.

Pembangunan Sebagai Jawaban atas Kemiskinan

Manusia adalah subyek pembangunan, maka tanggungjawab pembangunan adalah menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan subyek. Masalah fundamental yang dihadapi oleh manusia adalah tak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan primer. Masalah ini diakibatkan oleh kemiskinan dari rakyat sendiri. Oleh sebab itu, mengusahakan pembangunan sama dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pemberantas kemiskinan. Kemiskinan dibedakan dalam dua bentuk yakni kemiskinan mutlak dan relatif. Kemiskinan mutlak berkaitan dengan tak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat (pangan, sandang, kesehatan, kerja yang wajar), dan kemiskinan relatif menyangkut hal-hal sekunder seperti partisipasi, hak rekreasi dan lingkungan hidup yang tak menyenangkan (Iwan *et al.*, 2004). Dari kedua bentuk kemiskinan ini, kemiskinan mutlak merupakan bentuk kemiskinan yang paling ekstrim sebab kemiskinan ini melahirkan kelaparan, kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat.

Mengenai hal ini tugas pembangunan merupakan jawaban atas pemberantas kedua bentuk kemiskinan ini demi mencapai suatu keselarasan dan pemerataan serta kesejateraan bagi masyarakat. Tujuan pembangunan sendiri secara mendasar, mengatasi atau sedapat mungkin mengurangi penderitaan manusia dari berbagai

seginya. Artinya bahwa pembangunan ini mesti berangkat dari bawah di mana proses ini sendiri mampu untuk melihat, menelisik penderitaan yang membelengu dan mewujudkan kesejateraan dengan memperdaya atau menggerakkan seluruh masyarakat dengan aspirasinya, beranjak dalam titik kemajuan. Paradigma yang mesti ditonjolkan dalam hal ini yaitu paradigma humanisme, di mana kesadaran manusia sendiri mesti disoroti dan diusik dalam kungkungan atau ikatan baik pemahaman mereka akan kodrat kemiskinan atau kungkungan struktural ke arah kebebasan dan kemajuan. Hambatan-hambatan yang terus menggukung kemajuan dan kebebasan manusia dalam penderitaan mereka, ditempatkan pada titik di mana hambatan itu sendiri mampu diteropong dalam pelbagai perspektif yang bersifat liberatif. Titik perhatian tersebut mesti selalu diarahkan pada pola-pola pembangunan yang mampu secara jelas mengangkat manusia dalam berbagai belenggu mereka pada titik kemajuan yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan mereka sendiri (Muller, 2001).

Pola pembangunan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menunjukkan definisi yang secara jelas mendindikasikan bahwa awal dan akhir pembangunan ialah manusia dan berbagai dimensi dalam tatanan hidupnya, serta tujuan pembangunan sendiri adalah menyingkapi dan membebaskan manusia dalam penderitaannya. Arti dan tujuan yang mendasar tersebut dapat dipenuhi jika mengandaikan beberapa hal: pertama, titik dan pangkal pembangunan ialah manusia dan kepiuann hidupnya. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dibuat mesti berorientasi pada penanganan masalah tersebut. Kedua, orang yang paling menderita (miskin) mendapat perhatian yang paling utama. Kemiskinan adalah penderitaan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan sendiri mesti mampu mengatasi masalah ini. Ketiga, penderitaan manusiawi merupakan taraf yang mengukur dan menuntun arah pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sendiri mesti menghindari potensi yang melahirkan penderitaan yang baru (Sen, 2000).

Pembangunan hadir untuk menyediakan berbagai sarana serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat guna mengembangkan potensi-potensi mereka menuju pada kemajuan. Pembangunan menyadarkan masyarakat akan setiap potensi yang dapat mengantar mereka keluar dari segi kehidupan ini dengan menyediakan berbagai sarana atau berbagai instrument agar terus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pembangunan menyediakan alat-alat indstustri untuk memproduksi dan merawat keadaan serta hasil dari alam sekitar, menyediakan lapangan pekerjaan serta layanan sosial yang layak dan wajar bagi masyarakat, sehingga masyarakat pelan-pelan akan

keluar dari kehidupan memilukan, yang bagi mereka telah dianggap sebagai sebuah nasib. Pembangunan di sini hadir sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat yang menopang kebutuhan-kebutuhan dan memungkinkan kehidupan terus mendapat prioritas demi melestarikan kehidupan yang baik, dan tidak sebaliknya sebagai tempat akumulasi kekayaan. Dengan demikian, tanggungjawab utama pembangunan ialah menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau sebagai bentuk jawaban terhadap kemiskinan masyarakat.

Adanya pembangunan merupakan bentuk jawaban atas kemiskinan. Namun kenyataan menunjuk hal yang berbeda. Di beberapa tempat, pembangunan itu berbanding terbalik dari yang seharusnya. Fakta menunjukkan bahwa di balik pembangunan yang dibuat terselubung suatu tujuan subyektif atau ideologi tertentu dari para pemilik modal untuk mencari keuntungan atau laba bagi segelintir orang. Sang pemilik modal dalam pembangunan ini atau para pemilik modal mengatasnamakan rakyat dan kesejateraan umum untuk melakukan akumulasi keuntungan bagi diri mereka. Alhasil kemiskinan rakyat tidak akan teratasi dan para pemilik modal akan terus hidup dalam keuntungan-keuntungan muslihat. Para penguasa terus mengambil manfaat dalam kesempatan “emas” ini dan masyarakat akan terus merasa bangga terhadap pembangunan yang tidak menghasilkan apa-apa. Para penguasa dengan cara mereka merembeskan sisa-sisa hasil keuntungan pembangunan ke masyarakat sehingga masyarakat secara kolektif tidak akan menyadari kemuslihatan mereka, justru sebaliknya, menyanjung-nyanjung kemuslihatan mereka. Tabiat demikian merupakan realitas yang banyak dijumpai dalam proses pembangunan. Jika tindakan pembangunan dilakukan dengan berselamatkan sebuah ideologi atau tujuan subyektif, lantas untuk siapakah pembangunan dibuat?

Pembangunan Untuk Siapa: Penguasa Vs Masyarakat

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan positif, akan tetapi dapat menjadi suatu hal yang buruk bagi masyarakat jika pembangunan tersebut dikontrol oleh suatu ideologi yang bersifat subyektif. Ideologi itu sendiri merupakan suatu prinsip yang mengarahkan atau menentukan arah hidup seseorang. Ideologi subyektif dalam hal ini berpaut dengan “si pengambil kebijakan” dan “si peraup keuntungan”. Kedua sifat tersebut mestilah berdiri dalam posisi membaris di mana ketika yang satu telah berhasil disebarkan maka yang lain dapat berhasil meraup pula. Oleh karena itu, dalam hal ini si pengambil kebijakan ialah kaum elitis yang memiliki pengaruh dan daya mempermainkan dan meracik kata-kata atau sebuah gagasan persuasif yang beorientasi

pada masa depan. Si pengambil keputusan layaknya menunjukkan sebuah padangan yang penetratif di mana ia sendiri mampu mensuguhkan sebuah masa depan di hadapan mata seluruh rakyat.

Masa depan menjadi sebuah senjata yang mampu mengunyah berbagai konsep yang hendak disampaikan secara lantang atau kebijakan lain yang berkontradiksi dengan ideologi si pengambil kebijakan (Berger & Luckmann, 1966). Masa depan tersebut disuguhkan secara rapi dengan sebuah dalil kemakmuran; penderitaan mesti terjadi di masa kini agar mampu melahirkan kemakmuran di masa yang akan datang. Dengan demikian, modal mesti dikumpulkan sebanyak mungkin di masa kini agar kemakmuran dapat tercapai di masa depan. Semakin besar modal yang dikumpulkan, semakin banyak keuntungan yang diberikan, atau dengan kata lain, kue ekonomi mesti besar supaya lapisan kelas bawah tidak hanya memperoleh potongan kue ekonomi yang lebih besar tetapi lebih berkecukupan (Berger, 2004). Jika kue ekonomi tersebut berhasil mencapai suatu akumulatif yang memadai, pemerataan di masa depanpun terjadi.

Ideologi tersebut dalam proses pejalanannya menunjukkan suatu hal yang berbanding terbalik. Masa depan yang disajikan dengan “lauk” kemakmuran tidak menunjukkan suatu kemikmatan melainkan sebuah kemelutan. Rakyat sebagai dasar pengumpulan modal serentak sebagai tujuan pengumpulan tersebut justru berjalan kepada keterbelakangan, bukannya semakin meningkat, tetapi semakin menurun. Kemiskinan, penderitaan dan kepilauaan menjadi sebuah fenomena yang dapat dijumpai di berbagai tempat setelah terhirup sebuah aroma harapan kemakmuran. Aroma itu dibawa pergi bersama dengan gema persuasif yang ditawarkan dengan kemerduan. Kemerduan yang tersebut kini hanya membawa bisikan mitos terhadap suatu kondisi yang sangat bersahaja. Optimisme rakyat akan kemakmuran telah terpenjara dalam ideologi subyektif kaum elit (pembuat kebijakan).

Bisikan mitos tersebut nampaknya tidak memiliki kekuatan yang kuat hingga dapat sampai pada obyek dari tujuan elitisi. Kaum elitisi atau Para pemilik modal memanipulasi keyataan akan ketaktercapaian atau mitos dengan bermain di balik cadar muslihat yang selalu tampak “tersenyum” terhadap rakyat sehingga memperdaya dan menciptakan ketaksadaran kolektif rakyat agar tunduk pada apa yang ditentukan oleh para pemilik modal.

Cadar muslihat terus dilakukan dalam pembangunan ini demi meraup keuntungan atau kekayaan besar bagi diri sang pemilik modal pembangunan. Atas nama rakyat dan visi kesejateraan umum, sang penguasa pelan-pelan memeras rakyat atau alam sekitar rakyat, untuk memenuhi tuntutan ideologi subyektifnya yaitu akumulasi

keuntungan yang besar. Rakyat akan ditidurkan dengan remah-remah keuntungan yang jatuh dari “meja” mereka agar terus tertidur dalam ketidaksadaran, dan mereka akan terus menari-nari oleh karena ketaksadaran itu. Pembangunan yang dibuat atas dasar konsep subyektif atau ideologi tidak pernah memertimbangkan nilai-nilai atau segi-segi kehidupan yang diperoleh rakyat, melainkan berjalan pada satu arah atau pertimbangan yaitu akumulasi kekayaan atau keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pembangunan ini.

Pembangunan berdasarkan ideologi, dibuat sedemikian rupa dengan menyerap nilai-nilai dari pembangunan sesungguhnya. Pembangunan ini tetap menyediakan instrument-instrumen atau hal-hal yang menandakan adanya pembangunan tetapi hasil pembangunan ini diterima oleh pemilik modal dan rakyat menerima tetes-tetes yang jatuh dari keuntungan para pemilik modal (Alexander, 2020). Pembangunan ini menyediakan alat-alat industri agar bisa mengelolah alam secara optimal, tetapi berujung pada eksploitasi alam besar-besaran yang berimbas pada kerusakan alam demi keuntungan (Kristeva, 2014). Di lain sisi, adanya bangunan-bangunan besar seperti hotel dan lain-lain dibuat sebagai suatu indikasi yang menandakan adanya kemajuan dari wilayah tersebut, akan tetapi sekali lagi hal itu dibuat untuk pemilik modal. Rakyat dalam posisi ini hanyalah sebagai alat untuk memproduksi keuntungan bagi pemilik modal dan rakyat sendiri akan teralienasi dari dirinya sendiri

Dalam kenyataan pembangunan seperti ini, rakyat tidak mendapat tempat, nilai-nilai kemanusiaan (rakyat) tidak diperhitungkan demi keuntungan para pemilik modal. Logika yang digunakan dalam pembangunan ini ialah logika pasar dalam ideologi kapitalis yaitu memproduksi sebanyak mungkin demi keuntungan yang besar. Tanggungjawab atau tujuan pembangunan sebagai peniadaan derita rakyat kini dibelokan ke arah atau tujuan kepentingan segelintir orang. Rakyat akan terus dengan mitos pembangunan yaitu demi kesejahteraan di masa depan dengan mengorbankan aspek kekinian rakyat. Pembangunan semacam ini bagi Peter L. Berger harus diberantas sebab harga yang mesti dibayar dalam pembangunan ini yaitu manusia sendiri.

Etika Humanistik Berger Bagi Pembangunan

Tanggungjawab pembangunan ialah meniadahkan kemiskinan yang melahirkan penderitaan besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, hakikat pembangunan itu sendiri dalam kenyataan telah dilecekan oleh karena kepentingan segelintir orang atau ideologi subyektif mereka, yang berimbas pada kemiskinan dan penderitaan yang terus bertambah atau dengan kata lain, yang kaya semakin menjadi kaya dan yang

miskin menjadi lebih miskin. Sebut saja dalam hal ini, pembangunan-pembangunan parawisata atau infrastruktur. pembangunan parawisata, pada dasarnya memiliki nilai positif, dengan membangun tempat-tempat bagi para pengunjung atau hal yang lain demi parawisata itu sendiri. Namun, di balik pembangunan itu, memberikan beberapa dampak negatif yang harus dirasakan oleh rakyat sekitarnya; semakin besar pembangunan yang dilakukan maka semakin besar lahan yang dibutuhkan. Tanah masyarakat sekitar sebagai sumber pendapatan menjadi korban oleh karena hal ini. Di lain pihak, meningkatnya penduduk akibat pendatang baru menyebabkan berkembangnya pola konsumtif yang mau tidak mau alam rakyat mesti dieksploitasi secara besar-besaran. Adanya komersialisasi yang memperhitungkan segala sesuatu dengan nilai uang dan lain-lain. Semua dampak ini semakin memiskinkan rakyat (Badj, 2024).

Hal lainnya seperti bangunan-bangunan besar yang dibuat demi kemajuan pembangunan parawisata itu sendiri, menyelebungin tujuan lain yaitu keuntungan para pemiliknya. Keuntungan yang diperoleh dari pembangunan ini tidak pernah dirasakan oleh rakyat ataupun “ya” tapi rakyat hanya mendapat remah-remah dari keuntungan para pemilik modal. Remah-remah ini merupakan kekuatan untuk membungkam rakyat atas keburukan para pemilik modal. Pembangunan demi kesejahteraan rakyat kini beralih menjadi keuntungan pemilik modal. Harapan-harapan untuk keluar dari kemiskinan atau penderitaan tidak akan terealisasi. Rakyat akan terus tidur dalam mitos pembangunan sambil melihat alam mereka dieksploitasi atau muslihat terus dilakukan demi keuntungan segelintir orang. Rakyat dengan wajah tersenyum menerima pelaksanaan pembangunan akan tetapi biaya yang mesti dibayar yaitu nilai kemanusiaan mereka sendiri; menjadi semakin miskin atau menderita di atas tanah mereka demi kepentingan segelintir orang. Kenyataan ini menunjukkan paradoksalitas pembangunan, yaitu antara penderitaan rakyat dan keuntungan pemilik modal.

Bagi Berger, paradoksalitas ini dapat diatasi jika nilai-nilai kemanusiaan selalu diperhitungkan dalam pembangunan. Etika humanistic yang ditawarkan oleh Berger sendiri sangatlah penting, bahwa dalam pembangunan nilai-nilai manusia mesti diperhitungkan, perhitungan terhadap penderitaan dan makna hidup manusia menjadi ideologi dan arah pembangunan. Tanggungjawab pembangunan tidak terarah pada satu segi kehidupan saja tapi seluruh segi kehidupan manusia. Pengusiran rakyat dari tanah miliknya, hilangnya masyarakat-masyarakat adat, eksploitasi alam dan lain-lain merupakan bentuk penderitaan manusia yang dihasilkan pembangunan. Biaya dari pembangunan semacam ini ialah ongkos manusia yaitu penderitaan tak terbandungi. Oleh

sebab itu, pembagunan mesti dibuat dengan melibatkan partisipasi kognitif masyarakat. Rakyat dilibatkan agar arah pembagunan selalu berjalan dalam koridor kemanusiaan dan tidak mengorbankan aspek-aspek kehidupan mereka. Hal ini dapat terjadi mengandaikan bahwa dasar dari pembagunan itu yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan orientasi pembagunan yaitu kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya demi kepentingan pemilik modal. Jalan untuk meniadakan derita atau kemiskinan dalam pembagunan bagi Berger yaitu melalui nilai-nilai kemanusiaan.

Mengenai etika humanistik ini, Berger ingin mengarisbwhahi pentingnya nilai-nilai manusia dalam pembangunan sekaligus hendak menyadarkan kita akan nilai-nilai kemanusiaan yang terus dikorbankan dalam pelaksanaan pembagunan. Pembagunan yang didasarkan pada suatu ideologi subyektif atau segelintir orang atau oleh suatu kebijakan dan janji muluk merupakan sumber penderitaan itu sendiri, dengan janji muluk dari pembangunan, rakyat diminta untuk mengorbankan harta mereka demi kemakmuran di masa depan yang tidak pernah terealisasi. Pengusiran atau terpingirnya rakyat lokal, pengusuran tanah rakyat, dan eksploitasi alam milik rakyat adalah bentuk penderitaan yang diberikan dari hasil pembagunan semacam itu. Dan kerana itu ideologi semacam itu harus didongkrak atau dirubuhkan dan diganti dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembagunan yang didasarkan pada etika humanistik bagi Berger merupakan jalan yang baik bagi penidiaan derita (Denar, 2015). Dengan demikian, rakyat tidak secara terus menerus tidur di dalam sebuah mitos atau muslihat pembangunan, melainkan dapat berjalan dengan bebas dari belunggu hidup untuk merasakan daya transformatif dari pembangunan itu sendiri yaitu kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Nilai-nilai humanistik yang ditawarkan oleh Peter L Berger niscaya merupakan suatu hal yang sangat penting. Nilai-nilai ini mesti menjadi dasar atau tolak ukur dalam berbagai pertimbangan atau kebijakan dari pembangunan itu sendiri. Dengan berpijak pada nilai kemanusiaan sebagai hal yang mesti diprioritaskan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, orientasi pembangunan yang dibuat akan terus terarah pada hakikatnya yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Aspirasi rakyat menjadi suatu gema yang tak tertinggalkan dan penderitaan menjadi sebuah pekerjaan yang mesti diracik dalam pemberdayaan progresif sebagai bentuk keterlapanan rakyat dalam blunggu penderitaan. Daya transformatif pembangunan itu sendiri akan selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, masalah-masalah fundamental dari negara seperti kemiskinan yang memberikan kemelutan atau

penderitaan hidup bagi masyarakat sekitar dapat diatasi, dan kehidupan yang selalu menghidupi nilai-nilai kesejahteraan rakyat akan terus terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Afandi, Syed., Afandi, Muslim., dan Erdayani, Rizki. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. CV Bintang Semesta Media.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Garden City, NY: Doubleday.
- Berger, P. L. (2004). *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial* (A. R. Toleng, Penerj.). LP3ES.
- Badj, Bernardus. (2024). Relavanasi etika politik Peter L. Berger bagi pembangunan pariwisata di Indonesia. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Teologi*, 15(2), 193-211.
- Denar, Beni. (2015). *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis, Teologis, atas Korporasi Tambang*. Ledalero.
- Fulcher, James. (2021). *Kapitalisme Sebuah Pengantar Singkat*. Ircisod.
- Jebadu Alexander. (2020). *Drakula Abad 21*. Ledalero.
- _____ (2021). *Dalam Moncong Neoliebralisme*. Ledalero
- Kristeva, Nur. (2014). *Kapitalisme Negara Dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- M, sastraprteja. (1992). *Dalam Pengantar Dari Buku Kabar Angin Dari Langit-Makna Teologi Dalam Masyarakat Modern*. LP3ES.
- Muller, Johannes. (2001). *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. ed. Eddy Kristiyanto. Kanisius.
- Nugroho, Iwan., et al. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Sen, Amartya. (2000). *Development as Freedom*. Alfred A. Knoff.
- Sedarmayanti, Sastrayuda Gumelar, & Afriza Lia. (2018) *Pembangunan & Pengembangan Parawisata*. PT Refika Aditama
- Brahman Soleh, A. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.